



Tahun 2025

RENJA PERUBAHAN



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 824 -KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 –

- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
 23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
 24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
 25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - d. penutup.
- KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut merupakan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah .

Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026.

Rencana Kerja atau disebut RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah– langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga

diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 (satu) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Tanah Laut.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu : Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
 - d. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - e. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4593);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) dan
 - q. Perbup Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024– 2026.
 - r. Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB)

- s. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- t. Surat Sekretariat Daerah Nomor 000.7.3/1300/P2EPD/Bapperida Tentang Permintaan Dokumen Perubahan Renja SKPD Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut ini adalah:

- a. Menjabarkan arahan umum Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026 dikaitkan dengan hasil kajian mengenai isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2025.
- b. Mengakomodasikan usulan-usulan dari unit-unit kegiatan
- c. Memberikan arah dan sekaligus tolak ukur keberhasilan pelayanan
- d. Mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik dengan dukungan pembiayaan dari APBD.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

- a. Terwujudnya dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi acuan bagi unit-unit kegiatan dan masyarakat.
- b. Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan
- c. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan pelayanan publik
- d. Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

1.4 Sistematika Penyusunan Rancangan Awal

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Sampai dengan Triwulan 1 dan Capaian Renstra Badan Kesbangpol
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESBANGPOL

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 3.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESBANGPOL

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025 TRIWULAN I

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 Badan Kesbangpol

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program, kegiatan & sub kegiatan, pelaksanaan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, hasil rencana program, kegiatan dan sub kegiatan. Evaluasi terhadap Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025 memuat bagaimana Badan Kesbangpol telah melaksanakan 6 program dan 12 kegiatan dan 38 Sub Kegiatan dengan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan sebesar 12,26%.

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tahun 2025 berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f) Penyediaan Bahan/Material
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - h) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Mebel
 - b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

- a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
- b) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- c) Pembinaan Terhadap Aktivoitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
- d) Pembentukan Paskibraka
- e) Pengangkatan Purna Paskibraka Duta Pancasila

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 - a) Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.
 - b) Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

- c) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - a) Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - b) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - a) Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - b) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - c) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - d) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - e) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Penyusunan Renja Perubahan Badan Kesatuan dan Poltik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

- a. Masalah – masalah yang dihadapi;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya.

Penyusunan Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2025 triwulan I sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan perubahan tahun 2025;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Tabel 2.1

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 TRIWULAN I
KABUPATEN TANAH LAUT**

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 01 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA											
8 01 01 2.01	Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
8 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		SILPA	4.999.930	-	-	-		0,00%	
8 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		SILPA	4.999.739	2.822.190	-	2.822.190	60,00%	56,45%	
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										#DIV/0!	
8 01 01 2.02 0001	1 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 org/ bulan	27 org/bulan	PAD, DAU, DAU Tambah Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	4.677.085.000	-	1.078.726.861	1.078.726.861	25,00%	23,06%	
8 01 01 2.02 0003	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen		SILPA	4.999.824	4.004.258	-	4.004.258	81,00%	80,09%	

8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
8 01 01 2.05 0002	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket		SILPA	-	-	-	-		0,00%
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
8 01 01 2.06 0001	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	SILPA	3.482.036	3.092.508	-	3.092.508	100,00%	88,81%
8 01 01 2.06 0002	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	7 Paket	Dana Bagi Hasil (DBH)	139.089.734,52	96.217.800		96.217.800	70,00%	69,18%
8 01 01 2.06 0003	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	SILPA	7.989.497	3.549.778	-	3.549.778	50,00%	44,43%
8 01 01 2.06 0005	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	SILPA	14.999.678,64	4.452.725	-	4.452.725	30,00%	29,69%
8 01 01 2.06 0007	6	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket/ Bahan Material yang disediakan	2 Paket	-	SILPA	14.987.461	-	-	-	0,00%	0,00%
8 01 01 2.06 0009	7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	15 Laporan	SILPA	175.200.000	52.959.410	-	52.959.410	32,00%	30,23%
8 01 01 2.06 0010	8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	-	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.992.401	-	-	-	0,00%	0,00%

8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
8 01 01 2.07 0005	1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yg disediakan	16 Unit	16 Unit	Dana Bagi Hasil (DBH)	29.598.815	21.950.340	-	21.950.340	100,00%	74,16%
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
8 01 01 2.08 0002	1	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	SILPA	75.000.000	13.487.647	-	13.487.647	25,00%	17,98%
8 01 01 2.08 0004	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	3 Laporan	SILPA	155.554.488	184.677	38.517.261	38.701.938	25,00%	24,88%
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
8 01 01 2.09 0001	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit/ 12 bln	1 Unit	Dana Bagi Hasil (DBH)	37.500.000	9.000.000	-	9.000.000	25,00%	24,00%
8 01 01 2.09 0002	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	5 Unit	Dana Bagi Hasil (DBH)	181.000.000	45.908.502	-	45.908.502	27,00%	25,36%
8 01 01 2.09 0006	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	3 Unit	Dana Bagi Hasil (DBH)	15.000.000	2.050.000	-	2.050.000	14,00%	13,67%
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN											

8 01 02 2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan									#DIV/0!	
8 01 02 2.01 0003	1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1200 Orang		SILPA	187.118.260,00	-	-	-	0,00%	
8 01 02 2.01 0004	2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	210 Orang		SILPA	299.700.907,00	-	-	-	0,00%	
8 01 02 2.01 0007	3	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen		SILPA	98.493.148,80	-	-	-	0,00%	
8 01 02 2.01 0008	4	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	45 Orang		SILPA	1.219.771.616,20	3.702.500	-	3.702.500	0,30%	
8 01 02 2.01 0011	5	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	33 Orang		SILPA	69.999.652		-	-	0,00%	
8 01 03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK										

	DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK											
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik											
8 01 03 2.01 0003	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	595 orang		Dana Bagi Hasil (DBH)	2.281.866.400,23	-			-		0,00%

8 01 03 2.01 0004	2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	700 Orang	SILPA	49.491.967,26	-	-	-	0,00%
8 01 03 2.01 0005	3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan	SILPA	4.048.430	-	-	-	0,00%
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN									
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang									

		Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan										
8 01 04 2.01 0003	1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	235 Orang		Dana Bagi Hasil (DBH)	539.339.756,76	1.500.000		1.500.000		0,28%
8 01 05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA										
8 01 05 2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya										
8 01 05 2.01 0003	1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan Di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	1590 orang		SILPA	285.665.356,85			-		0,00%

8 01 05 2.01 0004	2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang		Dana Bagi Hasil (DBH)	48.230.028,35	2.842.440	-	2.842.440	6,00%	5,89%
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL											
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial											
8 01 06 2.01 0001		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	6 Dokumen		SILPA	900.749	-		-		0,00%

8 01 06 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5 Orang		SILPA	-	-	-	-	0,00%
8 01 06 2.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	610 Orang		SILPA	225.874.685			-	0,00%

8 01 06 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6 Laporan	2 Laoran	SILPA	24.999.689	2.360.000	-	2.360.000	9,50%	9,44%
8 01 06 2.01 0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	-	SILPA	511.500.000	9.500.000	-	9.500.000	2,00%	1,86%
						11.393.479.250,61	279.584.775	1.117.244.122	1.396.828.897		12,26%

Dari Tabel 2.1 di atas dapat dilihat bahwa realisasi belanja Badan Kesbangpol pada triwulan I belum mencapai target yang ditetapkan oleh Kemendagri berdasarkan surat edaran Nomor 900.1.15.1/18786/Keuda yaitu 20%. Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk Triwulan I tahun 2025 diperoleh realisasi belanja Badan Kesbangpol sebesar **12,26%**.

Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan antara lain :

- (1) Efisiensi waktu yang tidak terjadwal dengan tepat;
- (2) Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan
- (3) Belum terpenuhinya kelengkapan administrasi

Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran pencapaian sasaran maka dapat diketahui tingkat pencapaian sasaran pada masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Capaian IKU Tahun 2025 hingga triwulan I

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Satuan
Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	100%	100%	%

Tabel 2.3
Daftar Potensi Konflik Tahun 2025

No	Kegiatan	Ruang Mediasi	Potensi Konflik
1.	Mediasi yang di lakukan antara petani plasma sawit Desa Asam-Asam dengan perwakilan PT KJW	Balai Desa Asam-Asam Kec. Jorong	Pembagian hasil panen sawit yang tidak transparan
			
2..	Monitoring rencana aksi demo warga Desa Sumber Makmur	Kantor Desa Sumber Makmur Kec. Takisung	aksi demo warga desa sumber makmur ke kantor DPRD terkait tuntutan agar Kepala Desa Sumber Makmur mundur dari jabatannya sebagai Kades
			

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut

No	Indikator Sasaran	SPM/Standar nasional	IKK	Baseline	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Capaian Kinerja Tahun	Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nilai LKj Badan Kesatuan Bangsa & Politik	-	-	80,00 (BB)	82 (BB)	83 (BB)	85 (A)	77 (BB)	78 (BB)	78 (BB)	
2	Presentase Potensi Gangguan/Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Tertangani	-	-	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Nilai IKM	-	-	Nilai	87	88	90	87,34	90	90	
4	Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan Kepegawaian	-	-	%	100%	100%	100%	90,86%	91%	91%	
5	Persentase perencanaan, laporan keuangan dan pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	-	-	%	100%	100%	100%	86,78%	90%	90%	
6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	-	-	Nilai	87	88	90	77	78	78	
7	Persentase potensi gangguan stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	-	-	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Persentase peningkatan pendidikan politik masyarakat	-	-	%	100%	100%	100%	11,08%	15%	15%	
9	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten	-	-	%	100%	100%	100%	38,10%	38,10%	38,10%	
10	Indeks Ketahanan Masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba	-	-	Nilai	80	81	82	80,268	81	81	
11	Persentase pelajar yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan	-	-	%	10%	15%	20%	15,39%	17%	17%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan untuk menuju kondisi yang diharapkan maka untuk menentukan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut menggunakan analisis sebagai upaya dalam menentukan dan mengembangkan faktor-faktor mana yang menjadi peluang-tantangan atau faktor kekuatan-kelemahan untuk mengatasi kendala yang ada dalam pencapaian target sasaran untuk meningkatkan pencapaian tujuan dengan penentuan isu- isu penting yang ingin dikembangkan adalah :

1. Radikalisasi dan Terorisme

Mencegah penyebaran ideologi radikal dan terorisme menjadi isu penting, mengingat tantangan terhadap ideologi negara dan upaya memecah belah kesatuan bangsa. Oleh karena itu penting bagi Badan Kesbangpol bersinergi bersama instansi vertikal dalam menjangring informasi intelijen untuk mencegah potensi radikalisme dan terorisme di masyarakat. Sinergitas Forkopimda juga sangat penting dalam menjaga stabilitas serta menciptakan situasi yang aman dalam mencegah radikalisme dan terorisme

2. Tantangan Multikulturalisme

Tanah Laut umumnya merupakan kabupaten dengan keberagaman etnis, agama, dan budaya. Isu terkait dengan toleransi antar kelompok dan menjaga kerukunan sosial menjadi sangat strategis dalam menjaga kesatuan bangsa. Pemahaman tentang ideologi Pancasila dan 4 pilar sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

3. Polarisasi Sosial dan Politik

Perbedaan pandangan politik yang semakin tajam di masyarakat dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan politik. Isu ini penting untuk dikelola agar tidak berkembang menjadi konflik yang merusak kesatuan bangsa di Tanah Laut. Pentingnya Pendidikan Politik di masyarakat sangat penting untuk menciptakan warga negara yang sadar, kritis, dan aktif dalam proses politik.

4. Pengaruh Global dan Transnasional

Globalisasi dan interaksi internasional membawa pengaruh besar terhadap politik dalam negeri. Pengaruh luar seperti aliran ideologi asing, organisasi internasional, atau tekanan global harus dihadapi dengan bijaksana. Rendahnya apresiasi dan minat generasi muda terhadap seni budaya lokal, berbanding terbalik dengan maraknya budaya asing.

5. Penguatan Demokrasi

Peningkatan kualitas demokrasi tetap menjadi isu strategis dalam memastikan partisipasi politik yang luas, adil, dan transparan. Penguatan partisipasi politik melalui pendidikan politik yang lebih baik dan dorongan untuk lebih aktif dalam pemilu sangat penting agar demokrasi bisa berfungsi secara maksimal.

6. Penanganan Konflik

Konflik yang muncul terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, seperti sengketa lahan dan kerusakan lingkungan, dapat mempengaruhi stabilitas politik dan social di masyarakat.

7. Pemilu dan Integritas Sistem Politik

Menjaga integritas dan kredibilitas pemilihan umum (pemilu) sangat penting untuk memastikan adanya pemerintahan yang sah dan diterima oleh masyarakat.

8. Pendidikan Politik dan Kewarganegaraan

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik, demokrasi, dan hak kewarganegaraan untuk memperkuat partisipasi politik yang sehat dan konstruktif.

Sebagaimana produk pelayanan yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut. Selama tahun 2025 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut memiliki pelayanan sebagaimana Tupoksi masing-masing bidang yang menjalankannya dan menjadi tanggung jawab SKPD. Berikut tabel terlampir.

Tabel 2.5
Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	BIDANG	PELAYANAN
1	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Fasilitasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
2	Kewaspadaan Nasional	Pengawasan Orang Asing, Fasilitasi Mediasi Konflik dan Forkopimda
3	Politik	Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik dan Bantuan Keuangan Penyelenggaraan Pilkada
4	Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	Penerbitan Surat Pemberitahuan Tanda Lapor Keberadaan Organisasi Masyarakat
		Fasilitasi Tes Urine Pegawai Lingkup Pemkab Tanah Laut
		Pemberian Rekomendasi Ijin Penelitian

1. Pemberian Rekomendasi Ijin Penelitian

Dasar regulasi yang mengatur permohonan izin penelitian berdasarkan regulasi Peraturan Menteri tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Sebelum penelitian dilakukan oleh peneliti apapun bentuk di wilayah Kabupaten Tanah Laut, seyogyanya peneliti menyampaikan surat izin penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut yang akan dilakukan pencatatan/pengagendaan atas permohonan surat yang dimasukkan sebagai langkah awal.

Atas dasar izin penelitian yang disampaikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut maka akan dikeluarkan Surat Rekomendasi Penelitian sesuai tingkat keperluan yang dilakukan oleh peneliti.

Berikut adalah data penerbitan izin rekomendasi penelitian tahun 2024 hingga triwulan 2.

Tabel 2.6

Data Penerbitan Rekomendasi Penelitian Tahun 2024

NO	IDENTITAS PENELITI	NAMA INSTANSI/LEMBAGA	JUDUL PENELITIAN	NO/TGL SURAT	TANGGAL PENELITIAN	LOKASI PENELITIAN
1	Silmi Hanifaty / 2310812120006 , dkk	Universitas Lambung Mangkurat	Studi Kasus Penyusunan Laporan Tugas Mata Kuliah "Studio Perancangan Arsitektur 4"	070 /27/ Bakesbangpol 21-02-2025	22 Februari 2025 s/d 23 Februari 2025	Rumah Dinas Bupati Tanah Laut (Balairung Tuntung Pandang)
2	SYAIKHA ARIFAH / 6301035611030003	Institur Pemerintahan Dalam Negeri	Efektivitas Website Mc.Tanahlautkab.Go.Id Dalam Layanan Penyebaran Informasi Publik Di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan	070 /4/ Bakesbangpol 06-01-2025	06 Januari 2025 s/d 25 Januari 2025	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut
3	Noor Sandy Masrinanda / 6301032306030004	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	070 /3/ Bakesbangpol 06-01-2025	06 Januari 2025 s/d 25 Januari 2025	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
4	TAUFIK ARRAHMAN / 6301032801030001	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT	Implementasi Model Pro Game Dalam Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis, Komunikasi, Dan Kerja Sama Muatan Pendidikan Pancasila Menggunakan Media Wordwall Dan Quiziz Peserta Didik Kelas V Di Sdn Kampung Baru	070 /12/ Bakesbangpol 11-02-2025	12 Februari 2025 s/d 12 Maret 2025	SDN Kampung Baru
5	F2_11_M. FARID DUDDIN AL FAJR / 6301031601020007	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan	070 /5/ Bakesbangpol 06-01-2025	06 Januari 2025 s/d 25 Januari 2025	BPKAD & BAPENDA
6	Nuur Innka Karomika / 6301036902040001	Politeknik Negeri Tanah Laut	Klasifikasi Stunting pada Anak Balita menggunakan Algoritma Naive Bayes	070 /10/ Bakesbangpol 23-01-2025	22 Januari 2025 s/d 28 Februari 2025	Puskesmas Pelaihari
7	Dr. JUANDA, SKM. M. Kes. / 6372061607670001 , dkk	Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin	Praktek Kerja Komunitas (PKK)	070 /19/ Bakesbangpol 13-02-2025	17 Februari 2025 s/d 05 Maret 2025	Desa Padang, Desa Kait-Kait, Desa Kait Kait Baru, Desa Bentok Darat
8	Muhammad Akrom Norrahan / 6301022409020001	Universitas Borneo Lestari	Evaluasi Pengelolaan Obat Di Puskesmas Wilayah Kabupaten Tanah Laut	070 /23/ Bakesbangpol 17-02-2025	24 Februari 2025 s/d 31 Maret 2025	6 Puskesmas di kabupaten tanah Laut, Pelaihari,Angsau,Tajau pecah,Jorong,Asam-asam,Kintap
9	Akhmad Nur hakim / 2110119210043	Universitas Lambung Mangkurat	Pengembangan Buku Ensiklopedia Kelas Reptil Di Kawasan Hutan Mangrove Desa Sungai Bakau Kabupaten Tanah Laut Dalam Melatih Keterampilan Berpikir Kritis Mahasiswa	070 /29/ Bakesbangpol 24-02-2025	26 Februari 2025 s/d 28 Februari 2025	Kawasan Mangrove Desa Sungai Bakau
10	Salma Nida Ulanhar / 2110119220032	Universitas Lambung Mangkurat	Pengembangan Buku Ensiklopedia Kelas Mamalia di Kawasan Hutan Mangrove Desa Sungai Bakau Kabupaten Tanah Laut Dalam Melatih Keterampilan Berpikir Kritis	070 /28/ Bakesbangpol 24-02-2025	26 Februari 2025 s/d 28 Februari 2025	Kawasan Mangrove Desa Sungai Bakau
11	M. Rezky Abdillah / 6306061606030002	Universitas Borneo Lestari	Evaluasi pengelolaan obat kadaluwarsa di ruang farmasi Puskesmas wilayah tanah laut	070 /25/ Bakesbangpol 17-02-2025	24 Februari 2025 s/d 31	Puskesmas asam asam Puskesmas jorong Puskesmas Tajau pecah Puskesmas Puskesmas Pelaihari

					Maret 2025	
12	Rahmad Saputra / 6301021508010003	Universitas Borneo Lestari	Evaluasi Ketersediaan Vaksin di Puskesmas Wilayah Kabupaten Tanah Laut	070 /24/ Bakesbangpol 17-02-2025	24 Februari 2025 s/d 31 Maret 2025	6 Puskesmas di kabupaten Tanah Laut, Pelaihari,Angsau,Tajau Pecah,Jorong,Asam- Asam,Kintap
13	Shena Widya Putri Hartono / 6301034511030008	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Efektivitas Program Magang Jepang Dalam Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan	070 /01/ Bakesbangpol 06-01-2025	06 Januari 2025 s/d 25 Januari 2025	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT, BADAN PELAYANAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
14	Candika diva maharani / 2200312320010	Universitas lambung mangkurat	Analisis kontribusi pendapatan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kabupaten tanah laut	070 /13/ Bakesbangpol 11-02-2025	12 Februari 2025 s/d 12 Maret 2025	Badan pendapatan daerah kabupaten tanah laut
15	LISDA YANTI, A.Md. Gz / 6301036004970001	UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI	Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri Pada Petugas Kebersihan Di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut	070 /21/ Bakesbangpol 14-02-2025	13 Februari 2025 s/d 12 Maret 2025	Dinas perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup kabupaten tanah laut
16	Heri Novianta Suraja / 6301072311010001	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Kinerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut Dalam Meningkatkan Literasi Membaca Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan	070 /6/ Bakesbangpol 06-01-2025	06 Januari 2025 s/d 25 Januari 2025	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut
17	Arbainah / 6301035801850007	Poltekkes Kemenkes Banjarasin	Hubungan Indeks Masa Tubuh (IMT) dan Rasio Lingkar Pinggang Pinggul (RLPP) dengan Kadar Kolesterol pada Penderita Diabetes Mellitus Usia Produktif di Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) Wilayah Kerja Puskesmas Angsau Tahun 2025	070 /11/ Bakesbangpol 03-02-2025	01 Februari 2025 s/d 28 Februari 2025	Posbindu Wilayah Kerja Puskesmas Angsau
18	Muhammad Khalis Randani / 6301032808030002	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Pelaksanaan Kewenangan BPBD dalam Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan	070 /2/ Bakesbangpol 06-01-2025	06 Januari 2025 s/d 25 Januari 2025	BPBD Kabupaten Tanah Laut
19	Ruaida Rahmi / 6301046903030001	Universitas Lambung Mangkurat	Meningkatkan Keterampilan Pemecahan Masalah dan Berpikir Kreatif Dalam Mata Pelajaran Matematika Menggunakan Model PBL, STEAM, Kontekstual dan Media GeoMath pada Siswa Kelas III UPTD SDN 1 Kurau Utara	070 /26/ Bakesbangpol 19-02-2025	20 Februari 2025 s/d 20 Maret 2025	UPTD SDN 1 Kurau Utara
20	Ahmad Maulana / 6303050505030002	Institut Agama Islam Darussalam Martapura	Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Pelaihari dalam Perkara Harta Bersama	070 /9/ Bakesbangpol 20-01-2025	20 Januari 2025 s/d 20 Maret 2025	Pengadilan Agama Pelaihari
	Muhammad Radhin Billah /	Universitas Lambung	Pengembangan Buku Ensiklopedia Burung Air Di Kawasan Mangrove Desa Sungai Bakau Kabupaten Tanah Laut Dalam Melatih Keterampilan Berpikir	070 /30/	26 Februari	Kawasan Mangrove Desa

21	2110119110015	Mangkurat	Kritis Mahasiswa	Bakesbangpol 24-02-2025	2025 s/d 28 Februari 2025	Sungai Bakau
----	---------------	-----------	------------------	----------------------------	------------------------------	--------------

2. Pengawasan Orang Asing

Sebagaimana Kegiatan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing ini dibidangi oleh Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kewenangan Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini yaitu sebagai pemantauan keberadaan tenaga kerja asing dan bekerja sama dengan imigrasi Kalimantan Selatan.

3. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dibidangi oleh Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dibentuk berdasarkan Permendagri Nomor 02 Tahun 2018 yang diubah dengan Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

4. Pos TNI AL

Penempatan Personil Satgas TNI AL diwilayah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka pengamanan wilayah operasi oleh aparat keamanan untuk pencegahan kejahatan laut dan pesisir pantai diwilayah Kabupaten Tanah Laut hal ini sesuai dengan permohonan penempatan Satgas di Pos TNI AL di Batakan, Tabanio, Asam-Asam dan Muara Kintap surat Nomor : 800/640/Kesbangpollinmas tanggal 31 Desember 2010.

5. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TIMDU PKS)

Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TIMDU PKS) dibentuk berdasarkan Permendagri Nomor 02 Tahun 2018 yang diubah dengan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Tim terpadu dibentuk guna menjangkau/deteksi dini dan kewaspadaan daerah dalam penanganan dan pencegahan sengketa diwilayah Kabupaten Tanah Laut.

6. Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik

Fasilitasi bantuan keuangan partai politik sebanyak 10 Parpol untuk tahun 2022 tahun berjalan yang dikoordinir oleh Bidang Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut. Regulasi yang mengatur tentang bantuan keuangan partai politik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 tentang Pedoman tata cara perhitungan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan tata tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut sesuai tugas pokok dan fungsi hanya memberikan surat keterangan atas pengajuan berkas permohonan bantuan keuangan partai politik berdasarkan proposal yang dibuat. Atas kelengkapan persyaratan data-data dukung yang disampaikan oleh partai politik ke Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut akan dilakukan check tersendiri yang ditanda tangani oleh Tim Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut antara lain.

7. Penerbitan Surat Pemberitahuan Tanda Laport Keberadaan Organisasi Masyarakat

Jumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan lembaga swadaya

masyarakat (LSM) cukup banyak yang terdaftar di Kabupaten Tanah Laut

tetapi hanya sebagian kecil saja yang melakukan pelaporan keberadaan Ormas/LSM ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Ada beberapa perubahan dalam regulasi yang menyatakan bahwa untuk penerbitan surat keterangan terdaftar (SKT) tidak lagi menjadi wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

8. Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik dan Bantuan Keuangan Penyelenggaraan Pilkada

Fasilitasi bantuan keuangan partai politik ini dikoordinir oleh Bidang Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.

Regulasi yang mengatur tentang bantuan keuangan partai politik diatur dalam Permendagri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata cara perhitungan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik. Selain Bantuan Keuangan Partai Politik, Badan Kesbangpol melalui Bidang Politik juga memfasilitasi Bantuan Keuangan Penyelenggaraan Pilkada yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta hibah Pengamanan Pilkada kepada Korem Antasari dan Polres Tanah Laut.

9. Fasilitasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mengkoordinir pelayanan Kegiatan seperti :

- a. Kegiatan Kepaskibrakaan dengan berdasarkan regulasi peraturan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (lambang Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86) dan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Bentuk kegiatan ini yaitu pelaksanaan pembentukan dan pembinaan Paskibraka.

- b. Kegiatan Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) dengan berdasarkan regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194) dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); Bentuk kegiatan ini yaitu Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) sebagai sarana forum komunikasi antar tokoh etnis/ suku yang bertujuan mengurangi gesekan dan sebagai penyelesaian masalah antar etnis/ suku
- c. Kegiatan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan (PWK) bagi Pelajar/ Ponpes dengan berdasarkan regulasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); Bentuk kegiatan ini yaitu Penyuluhan sebagai sarana pemberian materi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara dengan output meningkatkan rasa patriotisme dan nasionalisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- d. Kegiatan Pusat Pembinaan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dengan berdasarkan regulasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); Bentuk kegiatan ini yaitu Fasilitasi Kajian dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dengan membentuk Tim PPWK dengan tugas membuat dan mengkaji baik modul materi maupun teknis kegiatannya.
- e. Kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dengan Peraturan menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); Bentuk kegiatan ini yaitu Fasilitasi Pembentukan Tim GNRM dan Fasilitasi pergerakan kegiatan GNRM.
- f. Kegiatan Bela Negara dengan berdasarkan regulasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1 serta Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); Bentuk kegiatan ini yaitu Fasilitasi Pembinaan Bela Negara terhadap generasi muda dengan bentuk Kemah Bela Negara.

10. Fasilitas Tes Urine Pegawai Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (P4GNPN)

Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN) Pasal 27 ayat (5) bahwa kegiatan P4GNPN difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan/atau urusan perempuan dan perlindungan anak berkoordinasi dengan BNNKK, serta Pasal 36 ayat (5) bahwa biaya fasilitas P4GNPN dibebankan pada APBD melalui anggaran kegiatan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan kegiatan tes urine yang diikuti oleh pegawai lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, baik ASN, Non-ASN maupun Perangkat Desa. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan Deteksi Dini Test Urine Narkoba yaitu:

- a) Mengetahui kandungan Narkotika dalam tubuh
- b) Memberikan edukasi dan meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan Narkotika
- c) Mewujudkan Kepala Desa dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika
- d) Mendorong Kepala Desa dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berorientasi pada lingkungan bersih dari penyalahgunaan Narkotika.

11. Fasilitas Mediasi Konflik dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Konflik sosial menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan

kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan.

Di Kabupaten Tanah Laut selama beberapa tahun terakhir tidak pernah terjadi konflik sosial. Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terus berupaya melakukan pencegahan-pencegahan terjadinya konflik melalui sosialisasi kepada anggota masyarakat, organisasi masyarakat, sekolah-sekolah tentang pentingnya kerukunan dalam kehidupan masyarakat.

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) adalah forum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Merujuk pada pasal 26, Forkopimda Kabupaten diketuai oleh Bupati dan Anggotanya terdiri atas Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, dan Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.

Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kabupaten Tanah Laut, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memfasilitasi, menyediakan serta mengadakan suatu forum pembahasan antar pejabat-pejabat tinggi tingkat Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut) untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

Sasaran Kerja Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tanah Laut yakni terlaksananya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta membangun sinergitas hubungan antarunsur pimpinan di daerah guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan di Daerah dengan dasar hukum sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Forkopimda itu sendiri merupakan forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, keamanan dan sosial politik.

2.4 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD adanya permasalahan yang timbul karena hal – hal tertentu. Permasalahan yang dihadapi Badan Kesbangpol antara lain:

Tabel 2.7
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Rendahnya akuntabilitas pada Badan Kesbangpol	Masih adanya kasus/temuan akuntabilitas pada Badan Kesbangpol	Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran
			Belum optimalnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
			Belum optimalnya peningkatan disiplin aparatur
			Belum optimalnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
			Belum optimalnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
			Belum terpenuhinya jumlah SDM
2	Legalitas Organisasi Kemasyarakatan belum terpenuhi	Belum seluruhnya Organisasi Masyarakat mendaftarkan serta melaporkan keberadaannya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rendahnya pemahaman organisasi terhadap aturan tentang Organisasi Kemasyarakatan
3	Masih tingginya penyalahgunaan Narkoba;	Rendahnya pengetahuan terkait bahaya penyalahgunaan narkoba	Masyarakat enggan melaporkan dalam hal adanya indikasi penyalahgunaan narkoba
			Belum adanya Materi mengenai bahaya Narkoba yang disisipkan ke dalam mata pelajaran
4	Belum terwujudnya pemahaman wawasan kebangsaan	Masih adanya perilaku masyarakat yang intoleran	Pelaksanaan bela negara belum optimal;
			Belum optimalnya pembauran kebangsaan
5	Menurunnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa.	Rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Ideologi Pancasila di masyarakat	Merosotnya kecintaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa khususnya di kalangan generasi muda
		Rendahnya pemahaman tujuan pencapaian 4 konsensus dasar di kalangan Generasi Muda/Pelajar Rendahnya pemahaman masyarakat terkait aturan tentang pendirian rumah ibadah	Belum maksimalnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 4 Konsensus Dasar Terdapat gejala intoleran antar umat beragama dan intern umat beragama
6	Sinergitas Koordinasi Kewaspadaan Dini Daerah belum maksimal	Belum maksimalnya fungsi Kewaspadaan Dini Daerah	Rendahnya pemahaman Kewaspadaan Dini Daerah Pemahaman kewaspadaan dini di level masyarakat belum terbangun dengan baik
7	Menurunnya Partisipasi Politik Masyarakat	Belum optimalnya sosialisasi, desiminasi terkait dengan Pendidikan Politik	Minimnya media/forum untuk pendidikan politik
8	Belum terselesaikannya	Masih adanya kasus kerawanan sosial	Adanya kasus sengketa lahan

masalah kerawanan sosial	yang disebabkan oleh ekonomi dan budaya	Adanya konflik yang disebabkan perbedaan budaya antara warga asli dan warga pendatang
--------------------------	---	---

Solusi dari permasalahan tersebut antara lain :

- 1) Pemenuhan sumber daya aparatur yang terampil.
- 2) Monitoring kegiatan pelaporan Ormas melalui aplikasi
- 3) Sosialisasi dan Deteksi Dini Pencegahan Narkoba ditingkatkan
- 4) Pembinaan wawasan kebangsaan semakin ditingkatkan
- 5) Fungsi kewaspadaan dini daerah dioptimalkan

2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada bagian ini untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak terdapat hasil kajian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait.

Usulan Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah bagian sub perencanaan mengajukan kemasing-masing bidang dan sekretariat, format yang sudah ada berdasarkan Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka masing-masing bidang dan sekretariat mengisi sesuai tugas pokok baik program, kegiatan dan sub kegiatannya seta dana dan sasaran yang akan dilaksanakan.

Sedangkan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 2.8

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Kode	SKPD/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Besaran Pagu (Rp)		Catatan
					APBD TA. 2025 Murni	Perubahan KUA dan PPAS	
1	2		3	4	5	7	9
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				12.292.375.047,84	12.992.607.142,21	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Tanah Laut			5.641.458.604,16	5.773.995.316,74	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanah Laut			9.999.669,00	9.999.669,00	
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tanah Laut	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	5 Dokumen	4.999.930,00	4.999.930,00	
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanah Laut	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	7 Laporan	4.999.739,00	4.999.739,00	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanah Laut			4.682.084.824,00	4.682.084.824,00	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanah Laut	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	27 Orang/bulan	4.677.085.000,00	4.677.085.000,00	
8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Tanah Laut	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	5 Dokumen	4.999.824,00	4.999.824,00	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tanah Laut			19.980.000,00	0	
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tanah Laut	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	24 Paket	19.980.000,00	0	Pengurangan anggaran karena efisiensi
8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tanah Laut	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	0 Orang	-	0	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanah Laut			435.740.808,16	511.303.295,32	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tanah Laut	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	6 Paket	3.482.036,00	3.482.036,00	
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tanah Laut	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	11 Paket	139.089.734,52	183.274.209,41	Penambahan untuk PC, Proyektor, Printer, Scanner
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tanah Laut	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	2 Paket	7.989.497,00	7.989.497,00	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tanah Laut	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	4 Paket	14.999.678,64	18.415.582,65	Spanduk dan Fotocopy

8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tanah Laut	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	0 Dokumen	-	0	
8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Tanah Laut	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	3 Paket	14.987.461,00	17.949.569,26	Perlengkapan Dukungan Porprov
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tanah Laut	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	60 Laporan	250.200.000,00	275.200.000,00	Penambahan Perjadin luar daerah
8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Tanah Laut	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	2 Dokumen	4.992.401,00	4.992.401,00	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanah Laut			29.598.815,00	41.180.166,50	
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kab. Tanah Laut	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	19 Unit	29.598.815,00	41.180.166,50	Kursi Kerja, Meja Kerja, Sofa
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tanah Laut	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	0 Unit	-	0	
8.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tanah Laut	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	0 Unit	-	0	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanah Laut			230.554.488,00	285.927.361,92	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tanah Laut	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	75.000.000,00	130.372.873,92	Pemasangan Kabel Listrik Kantor
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tanah Laut	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	155.554.488,00	155.554.488,00	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanah Laut			233.500.000,00	243.500.000,00	
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tanah Laut	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	37.500.000,00	37.500.000,00	
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tanah Laut	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	19 Unit	181.000.000,00	191.000.000,00	Pemeliharaan Mobil Dinas L300 DA 1875 LP
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tanah Laut	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	23 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	

8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kab. Tanah Laut			1.917.596.268,99	2.577.058.642,80	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Tanah Laut			1.917.596.268,99	2.577.058.642,80	
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Tanah Laut	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	1200 Orang	199.999.002,72	187.118.260,00	Penyesuaian pagu karena efisiensi
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Tanah Laut	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	280 Orang	309.999.197,48	381.700.576,00	Dukungan Porprov (pembukaan dan penutupan Porprov)
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kab. Tanah Laut	<i>Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka</i>	1 Dokumen	99.998.905,98	166.027.540,80	Lomba Paskibraka
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Kab. Tanah Laut	<i>Jumlah Paskibraka</i>	45 Orang	1.237.599.510,81	1.768.749.522,00	Perjadin Paskibraka
8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kab. Tanah Laut	<i>Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila</i>	33 Orang	69.999.652,00	73.462.744,00	PIN DPPI
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kab. Tanah Laut			2.396.019.210,65	2.379.223.738,29	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kab. Tanah Laut			2.396.019.210,65	2.379.223.738,29	
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Kab. Tanah Laut	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi</i>	295 Orang	2.305.642.312,39	2.281.866.400,23	Pengurangan anggaran karena efisiensi

	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		<i>Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>				
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tanah Laut	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	550 Orang	80.377.396,26	91.298.908,06	Uang Harian Peserta
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tanah Laut	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	2 Laporan	9.999.502,00	6.058.430,00	Pengurangan anggaran karena efisiensi
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kab. Tanah Laut			618.468.073,76	539.334.846,68	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan	Kab. Tanah Laut			618.468.073,76	539.334.846,68	
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Tanah Laut	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	235 Orang	618.468.073,76	539.334.846,68	Pengurangan anggaran karena efisiensi
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN	Kab. Tanah Laut			401.994.011,28	408.888.833,70	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab. Tanah Laut			401.994.011,28	408.888.833,70	
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	Kab. Tanah Laut	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi</i>	1590 Orang	346.163.982,93	360.658.805,35	Talkshow informasi dan edukasi pencegahan

	Penghayat Kepercayaan di Daerah		<i>Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>				narkoba, Honor tim & narasumber, Stik Narkoba
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Tanah Laut	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	200 Orang	55.830.028,35	48.230.028,35	Penyesuaian pagu karena efisiensi
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kab. Tanah Laut			1.316.838.879,00	1.314.105.764,00	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Tanah Laut			1.316.838.879,00	1.314.105.764,00	
8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tanah Laut	<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun</i>	4 Dokumen	1.998.505,00	900.749,00	Penyesuaian pagu karena efisiensi
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tanah Laut	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	3 Orang	27.625.000,00	19.371.000,00	Pengurangan peserta Diklat Intelijen
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tanah Laut	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	1169 Orang	249.999.685,00	257.334.326,00	Honor Timdu PKS

8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Kab. Tanah Laut	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6 Laporan	24.999.689,00	24.999.689,00	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.012.216.000,00	1.011.500.000,00	Pergeseran Perjadin dan makan minum Forkopimda



Pelahan, Juni 2025
 Kepala Badan Kesbangpol
 Kabupaten Tanah Laut,

MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
 NIP. 19790629 200003 1 004

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Kesbangpol, tidak terlepas dari Kebijakan Nasional khususnya yang berkaitan langsung di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perubahan Badan Kesbangpol

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut ini adalah mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol dalam memenuhi amanat undang-undang khususnya di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun sasaran yang ingin dicapai di dalam penyusunan Renja Perubahan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 adalah :

1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat (Trantibmas);
2. Meningkatnya pendidikan politik masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas fasilitasi penanganan konflik sosial;
4. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, agama dan budaya;
5. Meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Masyarakat
6. Meningkatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.

3.3 Program dan Kegiatan Badan Kesbangpol

Tabel 3.1
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025
Per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Per Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Kode	SKPD/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	Keterangan
				APBD TA. 2025 Murni	Perubahan KUA dan PPAS		
1	2	3	4	5	7	8	9
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			12.292.375.047,84	12.992.607.142,21	700.232.094,37	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.641.458.604,16	5.773.995.316,74	132.536.712,58	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.999.669,00	9.999.669,00	0,00	
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	5 Dokumen	4.999.930,00	4.999.930,00	0,00	
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	7 Laporan	4.999.739,00	4.999.739,00	0,00	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.682.084.824,00	4.682.084.824,00	0,00	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	27 Orang/bulan	4.677.085.000,00	4.677.085.000,00	0,00	
8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	5 Dokumen	4.999.824,00	4.999.824,00	0,00	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			19.980.000,00	0	-19.980.000,00	
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	24 Paket	19.980.000,00	0	-19.980.000,00	Pengurangan anggaran karena efisiensi
8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						

		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	0 Orang	-	0		
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			435.740.808,16	511.303.295,32	75.562.487,16	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	6 Paket	3.482.036,00	3.482.036,00	0,00	
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	11 Paket	139.089.734,52	183.274.209,41	44.184.474,89	Penambahan untuk PC, Proyektor, Printer, Scanner
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	2 Paket	7.989.497,00	7.989.497,00	0,00	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	4 Paket	14.999.678,64	18.415.582,65	3.415.904,01	Spanduk dan Fotocopy
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	0 Dokumen	-	0		
8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						
		<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	3 Paket	14.987.461,00	17.949.569,26	2.962.108,26	Perlengkapan Dukungan Porprov
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	60 Laporan	250.200.000,00	275.200.000,00	25.000.000,00	Penambahan Perjadin luar daerah
8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						

		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	2 Dokumen	4.992.401,00	4.992.401,00	0,00	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			29.598.815,00	41.180.166,50	11.581.351,50	
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	19 Unit	29.598.815,00	41.180.166,50	11.581.351,50	Kursi Kerja, Meja Kerja, Sofa
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	0 Unit	-	0		
8.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	0 Unit	-	0		
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			230.554.488,00	285.927.361,92	55.372.873,92	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	75.000.000,00	130.372.873,92	55.372.873,92	Pemasangan Kabel Listrik Kantor
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	155.554.488,00	155.554.488,00	0,00	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			233.500.000,00	243.500.000,00	10.000.000,00	
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						

		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	19 Unit	181.000.000,00	191.000.000,00	10.000.000,00	Pemeliharaan Mobil Dinas L300 DA 1875 LP
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	23 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			1.917.596.268,99	2.577.058.642,80	659.462.373,81	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			1.917.596.268,99	2.577.058.642,80	659.462.373,81	
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	1200 Orang	199.999.002,72	187.118.260,00	-12.880.742,72	Penyesuaian pagu karena efisiensi
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	280 Orang	309.999.197,48	381.700.576,00	71.701.378,52	Dukungan Porprov (pembukaan dan penutupan Porprov)
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka						
		<i>Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka</i>	1 Dokumen	99.998.905,98	166.027.540,80	66.028.634,82	Lomba Paskibraka
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka						
		<i>Jumlah Paskibraka</i>	45 Orang	1.237.599.510,81	1.768.749.522,00	531.150.011,19	Perjadin Paskibraka
8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila						
		<i>Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila</i>	33 Orang	69.999.652,00	73.462.744,00	3.463.092,00	PIN DPPI
8.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			2.396.019.210,65	2.379.223.738,29	-16.795.472,36	

8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			2.396.019.210,65	2.379.223.738,29	-16.795.472,36	
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	295 Orang	2.305.642.312,39	2.281.866.400,23	-23.775.912,16	Pengurangan anggaran karena efisiensi
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	550 Orang	80.377.396,26	91.298.908,06	10.921.511,80	Uang Harian Peserta
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						
		<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	2 Laporan	9.999.502,00	6.058.430,00	-3.941.072,00	Pengurangan anggaran karena efisiensi
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			618.468.073,76	539.334.846,68	-79.133.227,08	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan			618.468.073,76	539.334.846,68	-79.133.227,08	

8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	235 Orang	618.468.073,76	539.334.846,68	-79.133.227,08	Pengurangan anggaran karena efisiensi
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN			401.994.011,28	408.888.833,70	6.894.822,42	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			401.994.011,28	408.888.833,70	6.894.822,42	
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	1590 Orang	346.163.982,93	360.658.805,35	14.494.822,42	Talkshow informasi dan edukasi pencegahan narkotika, Honor tim & narasumber, Stik Narkotika
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	200 Orang	55.830.028,35	48.230.028,35	-7.600.000,00	Penyesuaian pagu karena efisiensi
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			1.316.838.879,00	1.314.105.764,00	-2.733.115,00	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			1.316.838.879,00	1.314.105.764,00	-2.733.115,00	

8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						
		<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun</i>	4 Dokumen	1.998.505,00	900.749,00	-1.097.756,00	Penyesuaian pagu karena efisiensi
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	3 Orang	27.625.000,00	19.371.000,00	-8.254.000,00	Pengurangan peserta Diklat Intelijen
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	1169 Orang	249.999.685,00	257.334.326,00	7.334.641,00	Honor Timdu PKS
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik						

		<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	6 Laporan	24.999.689,00	24.999.689,00	0,00	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>	12 Dokumen	1.012.216.000,00	1.011.500.000,00	-716.000,00	Pergeseran Perjadin dan makan minum Forkopimda



MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
 NIP. 19790629 200003 1 004

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESBANGPOL

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan melihat dan mempertimbangkan serta memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut 2024-2026.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dilakukan melalui diskusi intern serta memanfaatkan informasi yang berkembang. Dalam garis besarnya dapat disampaikan bahwa penyusunan Renja secara implisit didalamnya dijabarkan mengenai Tujuan, Kebijakan, dan Program yang realistik dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional.

Tabel rencana program dan Kegiatan, yaitu sebagai berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANAH LAUT

TAHUN 2025

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)					Nasional	Daerah		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					12.382.209.187,00	12.292.375.047,84	12.992.607.142,21	700.232.094,37									13.474.600.000,00	
	8				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					12.382.209.187,00	12.292.375.047,84	12.992.607.142,21	700.232.094,37									13.474.600.000,00	
	8	0			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					12.382.209.187,00	12.292.375.047,84	12.992.607.142,21	700.232.094,37									13.474.600.000,00	
1	8	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Sekretariat Kesbangpol				88 Nilai	88 Nilai	5.679.696.774,00	5.641.458.604,16	5.773.995.316,74	132.536.712,58							8.121.600.000,00	
	8	0	0	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	9.999.669,00	9.999.669,00	9.999.669,00	0,00			-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Perangkat Daerah		18.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	4.999.930,00	4.999.930,00	4.999.930,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2.0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	4.999.739,00	4.999.739,00	4.999.739,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	4.682.084.824,00	4.682.084.824,00	4.682.084.824,00	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Perangkat Daerah		6.508.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	4.677.085.000,00	4.677.085.000,00	4.677.085.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			6.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	0	0	2.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			5 Dokumen	5 Dokumen	4.999.824,00	4.999.824,00	4.999.824,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik				8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		100 Persen	100 Persen	29.914.500,00	19.980.000,00	19.980.000,00	0,00			-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Perangkat Daerah			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0	0	2.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			50 Paket	24 Paket	29.914.500,00	19.980.000,00	0,00	-19.980.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik					30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0	0	2.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			2 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik					20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 Persen	100 Persen	458.044.478,00	435.740.808,16	435.740.808,16	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Perangkat Daerah			670.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			6 Paket	6 Paket	3.482.036,00	3.482.036,00	3.482.036,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik					4.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

8	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 Persen	100 Persen	29.598.815,00	29.598.815,00	29.598.815,00	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	03. Penyelenggara n Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Perangkat Daerah		285.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0	0	2.0	000	Pengadaan Mebel																	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			16 Unit	19 Unit	29.598.815,00	29.598.815,00	41.180.166,50	11.581.351,50	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	03. Penyelenggara n Tata kelola Pemerintahan yang Baik			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0	0	2.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	03. Penyelenggara n Tata kelola Pemerintahan yang Baik			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0	0	2.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	03. Penyelenggara n Tata kelola Pemerintahan yang Baik			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persen	100 Persen	230.554.488,00	230.554.488,00	230.554.488,00	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	03. Penyelenggara n Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Perangkat Daerah		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	130.372.873,92	55.372.873,92	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	03. Penyelenggara n Tata kelola Pemerintahan yang Baik			80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	155.554.488,00	155.554.488,00	155.554.488,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	03. Penyelenggara n Tata kelola Pemerintahan yang Baik			220.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	239.500.000,00	233.500.000,00	233.500.000,00	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	03. Penyelenggara n Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Perangkat Daerah		290.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	03. Penyelenggara n Tata kelola Pemerintahan yang Baik			45.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	19 Unit	187.000.000,00	181.000.000,00	191.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	03. Penyelenggara n Tata kelola Pemerintahan yang Baik			220.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	0	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	23 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	03. Penyelenggara n Tata kelola Pemerintahan yang Baik			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
2	8	0	0			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase partisipasi pelajar dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan bela negara dan pengembangan wawasan kebangsaan				100 %	15 %	1.669.998.793,00	1.917.596.268,99	2.577.058.642,80	659.462.373,81								2.242.000.000,00	
	8	0	0	2.0		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Capaian Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-			100 %	100 %	1.669.998.793,00	1.917.596.268,99	1.917.596.268,99	0,00			-	03. Penyelenggara n Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pelajar dan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut			2.242.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2.0	000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah				1200 Orang	1200 Orang	199.999.609,00	199.999.002,72	187.118.260,00	-12.880.742,72	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggara n Tata kelola Pemerintahan yang Baik				220.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

									2 Laporan	2 Laporan	9.999.502,00	9.999.502,00	6.058.430,00	-3.941.072,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	03. Penyelenggara n Tata kelola Pemerintahan yang Baik			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
4	8	0	0						100 %	38,1 %	569.999.676,00	618.468.073,76	539.334.846,68	-79.133.227,08								250.000.000,00	
	8	0	0	2.0					-	100 %	569.999.676,00	618.468.073,76	618.468.073,76	0,00			-	03. Penyelenggara n Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Organisasi Pemuda; Pelajar dan Mahasiswa			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2.0	000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																	
									150 Orang	235 Orang	569.999.676,00	618.468.073,76	539.334.846,68	-79.133.227,08	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	-	03. Penyelenggara n Tata kelola Pemerintahan yang Baik				250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5	8	0	0						-	100 %	411.067.929,00	401.994.011,28	408.888.833,70	6.894.822,42								725.000.000,00	
	8	0	0	2.0					-	100 %	411.067.929,00	401.994.011,28	401.994.011,28	0,00			-	03. Penyelenggara n Tata kelola Pemerintahan yang Baik	ASN, PTT dan Kepala Desa, Pelajar SLTA, Pemuda dan Ormas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan			725.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

										6 Dokumen	4 Dokumen	1.998.505,00	1.998.505,00	900.749,00	-1.097.756,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraa n Tata kelola Pemerintahan yang Baik			6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2.0	000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	
										5 Orang	3 Orang	27.625.000,00	27.625.000,00	19.371.000,00	-8.254.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraa n Tata kelola Pemerintahan yang Baik			40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2.0	000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	
										610 Orang	1169 Orang	249.999.726,00	249.999.685,00	257.334.326,00	7.334.641,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraa n Tata kelola Pemerintahan yang Baik			350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2.0	000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	

RENCANA KERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA KERJA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	86		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Sekretaris
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai	Sekretaris
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai	Sekretaris
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100%	Penyediaan perlengkapan kantor	Sekretaris
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Pengadaan Peralatan Pendukung Kerja Kantor	Sekretaris
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Pembayaran Gaji Non-ASN	Sekretaris
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Prasarana Kantor	Sekretaris
Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Meningkatnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Wawasan Kebangsaan	100%		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan pementapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Wawasan kebangsaan	100%		Kabid Bina Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
					Pengumuman s/d seleksi Capaska Kabupaten	
					Pengumuman s/d Seleksi Capaska Tingkat Provinsi	
					Diklat Paskibraka beserta kelengkapan (Obade, Korsik)	
					Diklat Purna Paskibraka Duta Pancasila	
					Kemah Bela Negara	
					Penyelenggaraan peringatan hari-hari besar Nasional	
					Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) untuk Pelajar	
					Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) untuk Masyarakat	
					Rapat Koordinasi bersama pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tanah Laut	
					Lomba Paskibraka Tingkat Kabupaten Tanah Laut	

	Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan dalam melakukan pembinaan Politik	100%		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik	100%		Kabid Politik
					Pendidikan Politik kepada masyarakat di Kecamatan	
					Pemantauan situasi politik di Daerah	
					Pendidikan Politik kepada pemilih pemula di sekolah-sekolah	
					Pendidikan Politik dengan pembentukan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3)	
					Penyaluran hibah Parpol	
					Menerima Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah	
					Sosialisasi penyusunan laporan hibah kepada pengurus/kader Parpol	
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dilakukan Pemberdayaan dan Pembinaan	100%		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dilakukan Pemberdayaan dan Pembinaan	150 Orang		Kabid Ketahanan Seni Budaya Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi
					Menerima laporan keberadaan Ormas	
					Sosialisasi penggunaan Si-Lapor Ormas untuk pelaporan kegiatan Ormas	
					Koordinasi dengan melakukan kunjungan ke sejumlah Ormas di Tanah Laut	
					Verifikasi dan validasi administrasi pencairan hibah Ormas (termasuk FKUB)	
					Pembuatan SP2D Hibah Ormas	
					Menerima Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah	
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Soisla dan Budaya	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Soisla dan Budaya	100%		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah lembaga yang dilakukan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial	550 Org		Kabid Ketahanan Seni Budaya Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi

					Rapat Tim pelaksanaan tes urine	
					Permohonan tenaga pelaksana tes urine (PoI-PP, BNN)	
					Distribusi surat pemanggilan peserta tes urine	
					Pelaksanaan tes urine	
					Pelaporan hasil tes urine ke kepala daerah. BKPSDM dan Kesbang sebagai tembusan	
					Pelaksanaan sosialisasi Pendirian rumah ibadah	
					Sosialisasi Seni Budaya	
					Sosialisasi Ketahanan Ekonomi untuk pelaku usaha	
					Fasilitasi mediasi konflik intern umat beragama bersama FKUB	
					Koordinasi lintas agama bersama FKUB	
	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas, Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Presentase Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Konflik	100%		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%		Kabid Kewaspadaan Nasional
					Fasilitasi Mediasi Konflik Sosial	
					Rapat Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (KDPD)	
					Rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	
					Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)	
					Koordinasi dan penjangkaran informasi intelijen	
					Rapat bersama TNI-AL	
					Monitoring Tenaga Kerja Asing bersama Tim Pengawasan Orang Asing (PORA)	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang didalamnya mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun ini agar dapat dipakai menjadi pedoman dan acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.

Adanya rencana kerja ini agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut beserta seluruh staf dan jajarannya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap, dan berkesinambungan dengan tetap melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, baik itu di tingkat kementerian (pemerintahan pusat), pemerintah provinsi, kabupaten, serta juga di lingkup swasta dan masyarakat sehingga dapat melayani masyarakat dengan cepat, adil, transparan dan berkesinambungan . Adapun rencana kerja ini dalam hal ketersediaan anggaran kita dapat menerapkan manajemen berbasis kinerja. Kinerja lebih dioptimalkan dalam hal pelaksanaan tugas dan tujuan yang akan dicapai serta bekerja secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Rencana tindak lanjut dalam tahun anggaran yang akan datang yaitu dengan lebih mengoptimalkan kebutuhan masyarakat sesuai dengan tupoksi yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.

Pelahari, Juni 2025
Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Tanah Laut,

MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19790629 200003 1 004

